

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024



**DINAS SOSIAL KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN 2025**



## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

. Tujuan penyusunan (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2024 untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik menuju good governance, mengukur capaian kinerja visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Renstra Dinas Sosial dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pembanguna Daerah (RKPD) tahun berikutnya. Penyusunan (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 untuk menggambarkan realisasi kinerja Dinas Sosial, serta program-program yang telah tercapai dengan baik dan program-program yang belum tercapai dengan baik dan perlu ditingkatkan dalam tahun berikutnya untuk tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di akhir RPJMD 2021-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Doloksanggul, 06 Pebruaru 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Humbang Hasundutan



Frans Judika B. Pasaribu, SE, M.Si  
NIP. 19790804 200312 1 002



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya kepada publik. Laporan Kinerja ini merupakan wujud kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 - 2026, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 - 2026.

Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan berupaya dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan memberikan kontribusi dalam pelayanan dasar, perlindungan dan jaminan sosial. Uraian ketercapaian dan ketidaktercapaian kinerja sesuai dengan IKU Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

<b>Kineja Utama /Sasaran</b>		<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Interprestasi</b>
Sasaran	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	3,96%	3.83%	96.91%	Sangat Tinggi
	Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	Indek Kepuasan Masyarakat	86%	86.73%	100.08%	Sangat Tinggi
	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi AKIP	A	A	A	Sangat Tinggi



Dari 4 indikator kinerja sasaran yang di ukur capaian kinerjanya Dinas Sosial mendapatkan interpretasi sangat tinggi karena semua indikator telah mencapai target.

Besarnya alokasi anggaran belanja langsung dalam pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.216.949.090,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.971.130.956,- atau 94.17%. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya sinergi setiap level manajemen untuk berkontribusi memecahkan masalah; dan
2. Perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kebijakan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang diharapkan masyarakat.



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.3    Dasar Hukum .....	4
1.4    Sistematika Laporan Kinerja.....	5
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	7
2.2    Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	12
2.3    Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	12
BAB III.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1    Capaian Kinerja .....	18
3.2    Realisasi Anggaran .....	48
BAB IV .....	59
PENUTUP.....	59
LAMPIRAN.....	61



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 2. 1 .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 2. 2 .....</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2. 3 .....</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 2. 4 .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2. 5 .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 3. 1 .....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 3. 2 .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 3. 3 .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 3. 4 .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 3. 5 .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 3. 6 .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 3. 7 .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3. 8 .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 3. 9 .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 3. 10 .....</b>	<b>54</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial.....</b>	<b>3</b>
--	----------





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur





kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Sosial:

### **1.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas : melaksanakan pelayanan, bantuan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

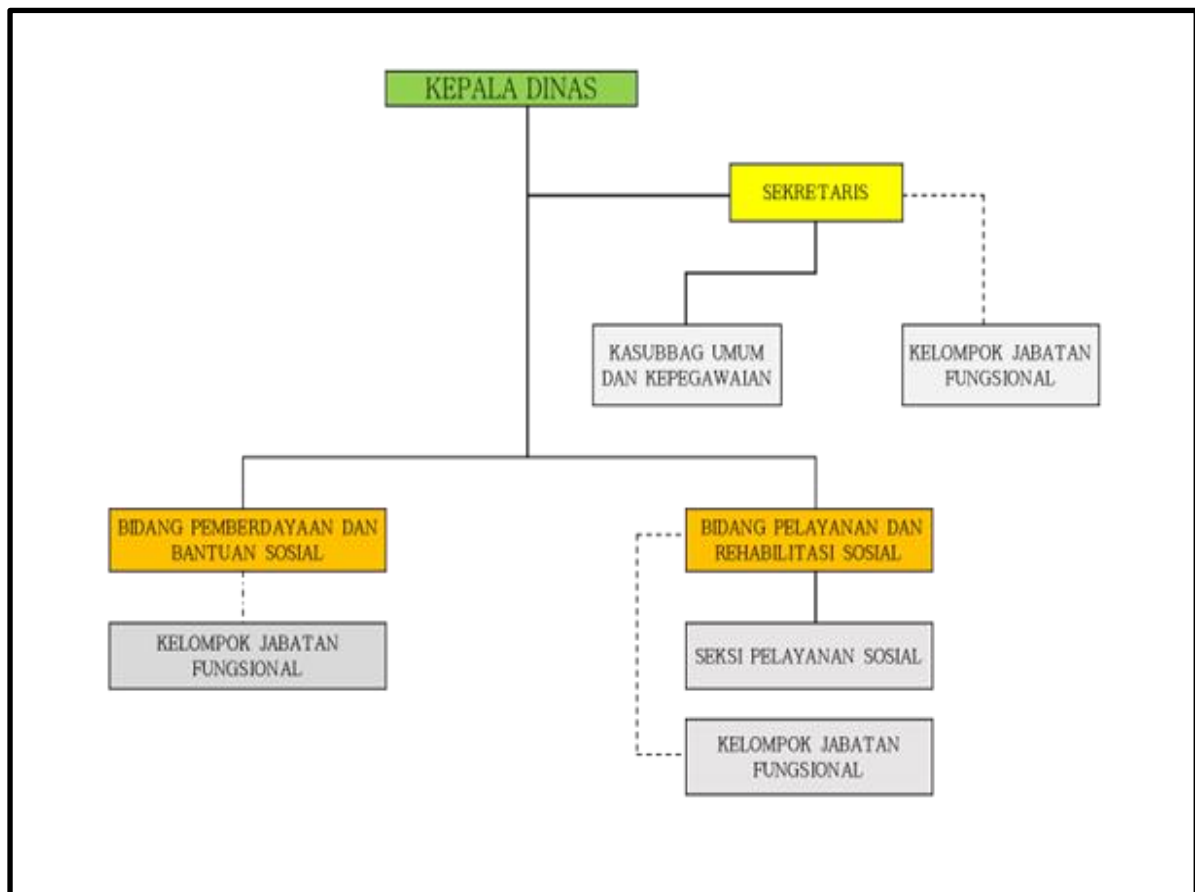
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- Penyelenggaraan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial;
- Pelaksana pelayanan sosial;
- Penyelenggaraan bantuan sosial;
- Penyelenggaraan jaminan dan perlindungan sosial;
- Penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
- Penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- Pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi bidang sosial;
- Pelaksanaan penanganan PMKS;
- Penyusun peta rawan sosial;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang sosial;

- Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat struktur organisasi dan tatakerja Dinas Sosial. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial.

**Lampiran 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan



### **1.1.2 Anggaran**

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial:

**Tabel 1. 1**  
**Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024**

<b>Sumber</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
(1)	(2)	(3)
DAU/DAU yang ditentukan peruntukannya	Rp. 5.090.750.204.-	Rp. 3.835.276.690.-
DBHCHT	Rp. 268.149.000.-	Rp. 197.533.500.-
Insentif Fiskal	Rp. 675.000.000.-	Rp. 184.138.900.-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 6.033.899.204.-</b>	<b>Rp. 4.216.949.090.-</b>

Sumber : APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 dan 2024

### **1.3 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Jinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### **1.4 Sistematika Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Sosial Tahun 2024 adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja.
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

RPJMDP Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026. Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan komitmen Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tertuang dalam RPJMDP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Adapun Keberhasilan pembangunan yang bersangkutan diukur dari sejauh mana pembangunan itu mewujudkan tingkat capaian yang ditetapkan. Tingkat capaian itu disebut visi yang akan menunjukkan arah pembangunan. Dalam hal ini visi akan menggambarkan ke manakah daerah yang bersangkutan akan dibawa dalam proses pembangunan. Tanpa visi ini, pembangunan akan tidak terarah dan keberhasilannya tidak akan dapat diukur. Visi akan memandu penyelenggara pembangunan dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakannya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus

terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk menuju Humbang Hasundutan “**MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG MAJU DAN BERMENTALITAS UNGGUL**”, maka rumusan misi Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mencapai visi Humbang Hasundutan 2021-2026 ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Dan Kesehatan;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertanian yang berkelanjutan, Ekonomi Kreatif, Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal;
4. Mewujudkan infrastruktur yang berasaskan kebermanfaatan dan pemerataan.

Dengan menyelaraskan dengan Visi dan Misi Bupati Humbang Hasundutan, dan sasaran pembangunan kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026, maka ditetapkan **Tujuan Dinas Sosial adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.**

Sesuai dengan Tujuan tersebut di atas, maka Dinas Sosial menetapkan sasaran dan target sebagai berikut :

1. Penanganan PMKS;
2. Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS ;
3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial ;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial.





**Tabel 2. 1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	80,22%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%
		2	Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	82,00	84,00	86,00	90,00
		3	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi Akip	BB	BB	A	A	A

Sumber : Renstra Dinas Sosial Periode 2021 – 2026



Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor : 74 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Utama Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial adalah sebagai berikut:



**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	Persen	Merupakan Penguatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatkan keberfungsian sosialnya	$\frac{\text{Jumlah yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Per Tahun}}{\text{Target yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk 5 Tahun}} \times 100 \%$	Dinas Sosial
2	Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Optimalisasi peran PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan Penguatan kapasitas pelayanan PSKS terhadap Masyarakat untuk Meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai peperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Indek Kepuasan Masyarakat	Dinas Sosial



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Persen	Optimalisasi penanganan bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Kebutuhan dasar korban bencana alam dan Bencana sosial yang dilayani / Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial ) X 100 %	Dinas Sosial
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi Akip	Nilai	Merupakan nilai evaluasi oleh APIP terhadap system akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial	Nilai Evaluasi AKIP OPD oleh APIP Kabupaten Humbang Hasundutan	Dinas Sosial

*Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 52 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial*



## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Dinas Sosial Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 :

**Tabel 2. 3**  
**Rencana Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	Persen	3,96%
		2	Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86,00
		3	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Persen	100%
		4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi Akip	Nilai	A

Sumber : Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2024

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna



untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Sosial tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 4**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	3,96%
2	Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
3	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi Akip	A

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024:

**Tabel 2. 5**  
**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
-1	-2	-3	-4	-5	-6
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Partisipasi PSKS Dalam Menangani PMKS	86,00	673.874.180	DAU



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2024**  
**Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan**

<b>1</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS yang dibina</b>	<b>66</b>	<b>673.874.180</b>	<b>DAU</b>
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kemampuan PSKS Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Tagana)	20	178.000.000	DAU
b	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kemampuan PSKS Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (TKSK)	12	189.370.600	DAU
c	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kemampuan pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (PKH)	33	257.860.780	DAU
d	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/kota	1	48.642.800	DAU
<b>II</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	<b>10,34</b>	<b>461.104.800</b>	<b>DAU</b>
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>57</b>	<b>117.301.800</b>	<b>DAU</b>
a	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	42	46.209.800	DAU
b	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penerima layanan kedaruratan yang ditangani	15	71.092.000	DAU
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>34</b>	<b>343.803.000</b>	<b>DAU</b>





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2024**  
**Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan**

a	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah data PMKS yang termutakhirkan	8429	33.072.000	DAU
b	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima bimbingan sosial	34	310.731.000	DAU/ DAU DITENTUKAN PERUNTUKANNYA
III	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Penanganan Ekonomi Fakir Miskin</b>	<b>3,87</b>	<b>469.944.400</b>	<b>DAU</b>
4	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Data Yang Ter Update</b>	<b>50000</b>	<b>469.944.400</b>	<b>DAU / DBH CHT</b>
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah fakir miskin yang didata	10000	49.997.500	DAU
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah data fakir miskin yang dikelola	50000	222.413.400	DAU
c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah fakir miskin yang difasilitasi dalam pengembangan bantuan ekonomi	110	197.533.500	DBH CHT
IV	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Perpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Sosial</b>	<b>100</b>	<b>184.138.900</b>	<b>DAU</b>
5	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat penanganan pemenuhan pangan dan sandang</b>	<b>100</b>	<b>184.138.900</b>	<b>DAU</b>
a	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan pasca bencana	100	134.586.900	INSENTIF FISKAL
b	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan pasca bencana	50	49.552.000	INSENTIF FISKAL
V	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan ASN Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>95</b>	<b>2.427.886.810</b>	<b>DAU</b>



<b>6</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Daerah</b>	<b>Persentase Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>7</b>	<b>14.652.431</b>	<b>DAU</b>
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan	7	14.652.431	DAU
<b>7</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan</b>	<b>95</b>	<b>2.070.661.947</b>	<b>DAU</b>
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	18	2.059.096.054	DAU
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan, jumlah laporan keuangan akhir tahun dan jumlah keuangan semester I dan II	15	11.565.893	DAU
<b>8</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>95</b>	<b>185.940.432</b>	<b>DAU</b>
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	5.923.000	DAU
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	79.903.366	DAU
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	21.396.000	DAU
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	10.572.066	DAU
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	68.146.000	DAU



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2024**  
**Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan**

<b>9</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95</b>	<b>60.627.000</b>	DAU
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	4.994.000	DAU
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	11.985.000	DAU
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2	43.648.000	DAU
<b>10</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>95</b>	<b>96.005.000</b>	<b>DAU</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	79.390.000	DAU
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	9.775.000	DAU
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	6.840.000	DAU
<b>TOTAL</b>				<b>4.216.949.090</b>	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun 2024



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Sosial.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Sosial. Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kinerja tersebut berjalan dan tercapainya target yang ditetapkan pada awal perencanaan. Pengukuran kinerja diperoleh dengan membandingkan rencana target dan hasil capaian/realisasi.

Capaian Indikator Kinerja =	Realisasi	X 100 %
	Target	

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50



### **3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan telah menetapkan 4 (empat) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2024, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir. Adapun Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	3,96%	3.83	96.91%	Sangat tinggi	Dinsos
2	Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	86.73	100.08%	Sangat Tinggi	Dinsos
3	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Dinsos
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi Akip	A	A	100%	Sangat Tinggi	Dinsos

Sumber : Dinas Sosial

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan dengan kategori interpretasi Sangat tinggi.

Untuk dapat melihat hasil capaian kinerja daripada sasaran pertama yaitu Penanganan PMKS akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formula Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dan hasilnya setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir. Adapun formula pengukuran pada Sasaran dengan indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Sasaran 1 : Penanganan PMKS**

Perhitungan yang digunakan untuk capaian target indikator kinerja ini yaitu berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang selanjutnya dievaluasi dalam diskusi terbatas lingkup Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Per Tahun}}{\text{Target yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk 5 Tahun}} \times 100 \%$$

Realisasi capaian :	6.052/157.886 X 100%	= 3.83%
Target :	6.245/157.886 X 100%	= 3.96 %

Dari tabel diatas dapat kita lihat realisasi pada sasaran penanganan PMKS adalah sebesar 3.83% dari target 3.96% dengan capain sebesar 96.91 % maka dapat disimpulkan hasil capaian masuk dalam kategori Interpretasi sangat tinggi.

Adapun indikator untuk mencapai target kinerja untuk penanganan PMKS ini, ada 2 indikator untuk mengukurnya yaitu :

#### **1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas menjalankan rehabilitas Sosial Dasar yaitu upaya yang lakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Penanganan PMKS yang dilakukan pada program Rehabilitasi Sosial meliputi pemenuhan



kebutuhan dasar yang dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial di dalam keluarga dan masyarakat. Layanan ini dilakukan dengan memberikan dukungan/pendampingan dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, LKS yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial yaitu berupa Layanan:

**a. Pemenuhan Permakanan**

Layanan Rehabilitasi sosial dasar penyediaan permakanan yang telah kita penuhi permakannya dari Tahun 2021-2023 yang sudah terpenuhi sebesar 341 jiwa, dan untuk tahun 2024 ditargetkan penambahan Pemenuhan Permakanan sebanyak 50 jiwa tetapi kegiatan pemenuhan permakanan ini tidak terlaksana diakibatkan adanya pengurangan anggaran sehingga capaian kinerja tidak tercapai 0%.

**b. Pemenuhan Alat Bantu**

Untuk Pemenuhan Alat Bantu Mulai yang terpenuhi dari tahun 2021-2023 sebanyak 531 unit. Untuk Tahun 2024 Pemenuhan Alat Bantu sebanyak 42 unit sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 88 Tahun 2024 tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial alat bantu kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023, dan bantuan ini diberikan kepada lansia alat bantu tongkat kaki 4 sebanyak 23 unit dan kepada penyandang disabilitas alat bantu walker sebanyak 19 unit.

**c. Pemenuhan Sandang**

Pada Tahun 2024 bahwa penyediaan sandang tidak dianggarkan karena pengurangan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak tercapai 0 %. Penyediaan sandang mulai tahun 2021-2023 yang sudah terpenuhi sebanyak 280.

#### **d. Pelayanan Kedaruratan.**

Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial penerima layanan yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk Tahun 2024 capaian kinerja melebihi target dari target sebanyak 15 orang dan realisasi sebanyak 28 orang. Pada Tahun 2024 ODGJ yang telah ditangani sebanyak 28 orang yaitu 1 orang ODGJ kita rujuk ke RSUD Jiwa di Medan dan 27 orang lagi kita reunifikasi kepada keluarga,

Dari hasil data diatas dapat kita lihat untuk memenuhi kebutuhan dasar pada tabel berikut:

**Tabel : Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

No	Uraian	Target/	Tahun						Total Target
		Realisasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah masyarakat yang mendapat kebutuhan dasar	Target	980	210	210	210	210	210	2.030
		Realisasi	975	57	154	70	-	-	1.256
2	Persentase masyarakat yang mendapat kebutuhan dasar	Target	48,28	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	100
		Realisasi	48,03	2,81	7,59	3.45	-	-	61,87

Dari tabel diatas dapat kita lihat realisasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS adalah 70 jiwa dibagi dengan Total Target yang direncanakan ditangani selama 5 tahun yaitu 2.030 ( $70/2.030 \times 100\%$ ) = 3.45%. Capaian ini masuk dalam kategori sangat rendah karena tidak sesuai dengan target dari 10,34 % dan realiasasi capaian 3,45% sehingga capaian kinerja 33.33%. Capaian Kinerja dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak tercapai sesuai target di karenakan kegiatan pemenuhan permakanan, Pemenuhan Sandang tidak terlaksana dan untuk pemenuhan alat bantu yang ditargetkan untuk 75 unit akan tetapi realisasi hanya 42 unit dan pemenuhan

Kesehatan yang dilayani sebanyak 28 jiwa sehingga total yang terlayani sebanyak 70 jiwa.

## **2) Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal yang dapat berupa bantuan sosial. Bantuan sosial dilaksanakan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan karena Bantuan Sosial bersifat sementara dan atau berkelanjutan kepada penerima manfaat. Sedangkan Jaminan Sosial dilaksanakan untuk menjamin fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi yang dapat berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial yaitu berupa Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial:

### **a. Masyarakat yang mendapat Bantuan PKH**

Dinas Sosial melakukan monitoring Penerima Bantuan PKH untuk masyarakat miskin dengan target kepada 1.000 KK realisasi 1.573 KK. Penyelenggaraan Penyaluran bekerjasama dengan Pihak PT.Pos dan Pihak Bank untuk mempercepat penyaluran kepada masyarakat dengan kriteria penerima adalah fakir miskin dan orang tidak mampu (Disabilitas, Lanjut Usia, dan Anak Telantar), tidak sebagai ASN, TNI/POLRI dan BUMN ataupun Sebagai Pensiunan. Tahun 2023 Penerima PKH sebanyak 11.226 KK dan untuk tahun 2024 penerima PKH sebanyak 9.653 sehingga ada penurunan Penerima PKH sebanyak 1.573 KK.



Turunnya jumlah Masyarakat Penerima Manfaat PKH dikarenakan telah meningkat kesejahteraan KPM penerima bantuan PKH, dan juga hasil dari verifikasi dan validasi ketidaklayakan oleh Dinas Sosial yang langsung turun ke lapangan.

#### **b. Masyarakat yang mendapat PBI-JKN**

Bansos PBI-JKN adalah singkatan dari Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bansos PBI-JKN hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan fakir miskin dan penerima PBI-JKN bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri. Dinas Sosial telah melaksanakan pendataan fakir miskin dan memasukkan ke aplikasi untuk selanjutnya masuk kedalam DTKS. Penerima Bantuan PBI-JKN sampai tahun 2023 sebanyak 87.385 jiwa dan tahun 2024 menjadi 91.760 sehingga ada penambahan penerima bantuan PBI-JKN sebanyak 4.375 jiwa.

#### **c. Mendapat Bimbingan keterampilan**

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud adalah untuk Peningkatan Perekonomian penyandang disabilitas. Tahun 2024 Dinas Sosial telah menargetkan bantuan Bantuan Ekonomi kepada Penyandang Disabilitas untuk 34 orang.

Dalam pemberian bantuan Ekonomi ini diharapkan Masyarakat penyandang disabilitas penerima manfaat dapat hidup secara mandiri dengan modal usaha yang telah diberikan oleh Dinas Dinas Sosial.

Dari hasil data diatas dapat kita lihat untuk pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial pada tabel berikut:

**Tabel :**  
**Kegiatan Pemenuhan Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

No	Uraian	Tahun							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
1	Jumlah masyarakat yang	Target	125.681	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	155.856



	mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Realisasi	123.509	8.125	6.171	5.982	-	-	143.787
2	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Target	80,64	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	100
		Realisasi	79,25	5,21	3,96	3.84	-	-	92.26

Dari tabel diatas dapat kita lihat realisasi Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS adalah 5.982 KK dibagi dengan Total Target yang direncanakan ditangani selama 5 tahun 155.856 jiwa X 100 %  $(5.982/155.856 \times 100) = 3.84\%$ . Hasil analisis pengukur capaian kinerja diatas dapat kita simpulkan bahwa capaian Perlindungan dan Jaminan Sosial telah masuk kategori sangat tinggi dimana target dari 3.87 % dan realiasasi 3,84% sehingga capaian kinerja 99.12%

Sesuai hasil uraian pengukuran capaian kinerja dari Pemenuhan kebutuhan dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial, maka untuk melihat **capaian kinerja dari pada sasaran pertama yaitu sasaran penangan PMKS untuk tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut :**

**Tabel :**  
**Penanganan PMKS Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun								Interpretasi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total	
1	Jumlah masyarakat yang mendapat kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial	Target	126.661	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	157.886	Sangat
		Realisasi	124.484	8.182	6.325	6.052	0	0	145.043	



2	Persentase masyarakat yang mendapat kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial	Target	80,22	3,96	3,96	<b>3.96</b>	3,96	3,96	100	Tinggi
		Realisasi	78,84	5.18	4,01	<b>3.83</b>	0,00	0,00	91.87	

Hasil dari capaian Penanganan PMKS Tahun 2023 adalah sebagai berikut : :

Jumlah yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Per Tahun  


---

 Target yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk 5 Tahun X 100 %

$$\frac{70 + 5.982 = 6.052}{157.886} \quad X 100 \% = 3.83 \%$$

Hitungan Capaian adalah 6.052 dan target untuk 5 tahun adalah sebesar 157.886 X 100% (6.052/157.887\*100) = 3.83%.. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, dapat kita simpulkan Interpretasi capaian Untuk Penanganan PMKS sangat tinggi yakni dari target 3,96% dengan realisasi 3.83 % sehingga capaian kinerja 96.91%. Realisasi Kinerja tersebut didasarkan pada penanganan yang telah dilakukan dengan memberikan kebutuhan dasar dan perlindungan jaminan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Fakir Miskin.

Dan Untuk Mendukung Capaian Kinerja pada sasaran Penanganan PMKS didukung oleh program dan Kegiatan yaitu :

1. Program Rehabilitasi
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosia

Untuk dapat melihat Data Rencana Target yang akan ditangani pada Penanganan PMKS dari Tahun 2021 - 2026 dapat kami sajikan pada Tabel Berikut :



**Tabel : Target dan Realisasi untuk Penanganan PMKS dari Tahun 2021 - 2026**

No	Unsur Variabel Kegiatan	Target							Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total	2021	2022	2023	2024	Total Realisasi
<b>I</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS</b>												
1	Jumlah Penambahan Pemenuhan Permakanan	280	50	50	50	50	50	530	280	39	22	0	341
	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pemenuhan Permakanan	52,83	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	100	52,83	7,36	4,15	0,00	64,34
2	Jumlah Penambahan Pemenuhan Alat Bantu	350	75	75	75	75	75	725	375	0	114	42	531
	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Alat Bantu	48,28	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	100%	51,72	0,00	15,72	5,79	73,24
3	Jumlah Penambahan Pemenuhan Sandang	300	70	70	70	70	70	650	280	0	0	0	280
	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pemenuhan Sandang	46,15	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	100%	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08
4	Jumlah Penambahan Pelayanan Kesehatan	50	15	15	15	15	15	125	40	18	18	28	104
	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	40,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100	32,00	14,40	14,40	22,40	83,20
<b>Jumlah</b>		<b>980</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>2.030</b>	<b>975</b>	<b>57</b>	<b>154</b>	<b>70</b>	<b>1256</b>
<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS</b>		<b>48,28</b>	<b>10,34</b>	<b>10,34</b>	<b>10,34</b>	<b>10,34</b>	<b>10,34</b>	<b>100</b>	<b>48,03</b>	<b>2,81</b>	<b>7,59</b>	<b>3,45</b>	<b>61,87</b>





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2024**  
**Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan**

<b>II</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS</b>												
1	Jumlah masyarakat yang mendapat sembako/pkh	40.646	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.646	40.810	3.556	2.330	1.573	48.269
	Persentase masyarakat yang mendapat sembako	80,26	11,85	1,97	1,97	1,97	1,97	100	80,58	7,02	4,60	3,11	95,31
2	Jumlah masyarakat yang mendapat PBI-JKN	85.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	82674	4529	3795	4375	95.373
	Persentase masyarakat yang mendapat PBI-JKN	80,95	0,00	4,76	4,76	4,76	4,76	100	78,74	4,31	3,61	4,17	90,83
3	Jumlah Bimbingan keterampilan (UEP dan Pelatihan)	35	35	35	35	35	35	210	25	40	46	34	145
	Persentase Bimbingan keterampilan (UEP dan Pelatihan)	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100	11,90	19,05	21,90	16,19	69,05
<b>Jumlah</b>		<b>125.681</b>	<b>6.035</b>	<b>6.035</b>	<b>6.035</b>	<b>6.035</b>	<b>6.035</b>	<b>155.856</b>	<b>123.509</b>	<b>8.125</b>	<b>6.171</b>	<b>5.982</b>	<b>143.642</b>
<b>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS</b>		<b>80,64</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>100</b>	<b>79,25</b>	<b>5,21</b>	<b>3,96</b>	<b>3,84</b>	<b>92,26</b>
<b>Jumlah yang mendapat Penanganan PMKS</b>		<b>126.661</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>157.886</b>	<b>124.484</b>	<b>8.182</b>	<b>6.325</b>	<b>6.052</b>	<b>144.898</b>
<b>Persentase Penanganan PMKS</b>		<b>80,22%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,96%</b>	<b>100%</b>	<b>78,84%</b>	<b>5,18%</b>	<b>4,01%</b>	<b>3,83%</b>	<b>88,03%</b>

## 2. Sasaran ke 2 : Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS

Dalam menilai indek kepuasan PSKS Mengacu kepada Permenpan no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, dan tolak ukur penilaian dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel :

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konvensi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3, 0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari survey Masyarakat terhadap pelayanan PSKS dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel : Pencapaian Kinerja PSKS Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas PSKS Dalam Penangan PMKS	Indeks Kepuasan PMKS Yang Ditangani	86.00	86.73	100.08

Pengolahan data rekapitulasi hasil survey Kepuasan masyarakat terhadap PSKS Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel :  
 Pengelolaan data survei kepuasan masyarakat per responden  
 Dan per unsur pelayanan psks dinas sosial kabupaten humbang hasundutan

NO	UNSUR SKM	SKM	
		Nilai rata rata unsur	Kategori
1	Pendamping secara berkala melaksanakan Pemutakhiran data setiap Keluarga Penerima Manfaat PKH.	3,46	BAIK
2	Pendamping selalu menanyakan apakah ada perubahan data pada setiap penerima PKH	3,51	BAIK
3	Pelaksanaan Tugas Pendamping dalam mengadakan pertemuan Kelompok tiap Bulan	3,55	SANGAT BAIK
4	Penyampaian Materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) modul Ekonomi	3,48	BAIK
5	Penyampaian Materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) modul Kesehatan dan Gizi	3,39	BAIK
6	Penyampaian Materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) modul Kesejahteraan Sosial	3,26	BAIK
7	Penyampaian Materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) modul Pengasuhan dan Pendidikan	3,33	BAIK
8	Penyampaian Materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) modul Perlindungan Anak	3,46	BAIK
9	Penyampaian Materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) modul Pencegahan dan Penanganan Stunting	3,49	BAIK
10	Bagaimana perasaan Bapak/Ibu terhadap budi bahasa, sikap, perilaku Pendamping dalam penyampaian materi?	3,54	SANGAT BAIK
11	Integritas Pendamping Sosial PKH yakni tindakan yang konsisten dan selaras tercermin dalam komitmen , jujur dan tanggungjawab.	3,57	SANGAT BAIK
12	Bagaimana tingkat kedisiplinan Pendamping PKH dalam pelaksanaan Pertemuan setiap bulannya ?	3,53	BAIK
13	Pendamping PKH/TAGANA/TKSK bertanggungjawab untuk turut serta mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi KPM PKH	3,43	BAIK
14	Pendamping PKH/TAGANA/TKSK memberikan pelayanan tanpa tekanan atau ancaman	3,47	BAIK
15	Pendamping PKH/TAGANA/TKSK proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi/pungli serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela	3,48	BAIK
16	Pelaksanaan Tugas Pendamping PKH/TAGANA/TKSK dalam hal monitoring penyaluran bantuan	3,56	SANGAT BAIK
	<b>SKM</b>	<b>3,47</b>	
	<b>NILAI DASAR</b>	<b>86,73</b>	
	<b>INDEKS KEPUASAN</b>	<b>B (BAIK)</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat Realisasi capaian 86.73% dari target 86.00% dengan capaian kinerja sebesar 100.08 % (kategori sangat tinggi) dengan nilai indeks SKM 3,40 dan Indeks kepuasan 84, 88 dengan mutu pelayanan B (Baik) dari jumlah responden.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS tidak terlepas dari program Pemberdayaan Sosial dan kegiatan serta peran dari Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS), pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kementerian Sosial RI. Dan untuk mendukung partisipasi aktif PSKS ini diperlukan dukungan pembiayaan anggaran, sarana prasarana untuk peningkatan kompetensi SDM dalam melaksanakan aktivitas yang akan dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada PMKS.

Adapun Sumberdaya PSKS Dinas Sosial adalah terdiri dari :

<b>No</b>	<b>SDM Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pendamping PKH	34 Orang
2	TKSK, TKSPD dan Peksos	12 Orang
3	Tagana	20 orang
<b>Jumlah</b>		<b>66 orang</b>

### **3. Sasaran ke 3 : Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**

Program penanganan Bencana merupakan bentuk perlindungan sosial kepada korban bencana yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial saat dan pasca bencana. Hal ini juga merupakan amanat Undang- Undang tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menanggulangi bencana yang terjadi di daerah. Pemberian program ini menjamin korban bencana saat dan pasca bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya.

**Tabel : Pencapaian Kinerja Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100%	100 %	100 %

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial memberikan bantuan logistik pangan dan sandang kepada masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial. Dinas Sosial telah melakukan beberapa kegiatan dalam penanggulangan saat dan pasca bencana dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Bantuan yang diberikan berupa evakuasi korban dari lokasi bencana, pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan yang tersampaikan tepat waktu. Pada tahun 2024, jumlah kejadian bencana ada sebanyak 57 kejadian adapun bantuan yang diberikan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

**1) Penyediaan Makanan**

Dinas Sosial telah menyalurkan makanan berupa sembako kepada korban bencana sebanyak 57 KK, Penyediaan permakanan/makanan berupa sembako yang besumber dari APBD Dinas Sosial untuk korban bencana sosial.

**2) Penyediaan Sandang**

Penyediaan paket sandang sebanyak 19 KK diberikan kepada korban bencana untuk membantu kelengkapan kebutuhan sehari-hari saat dan pasca bencana

Berkat kesiap siagaan petugas TAGANA dalam penanganan setiap bencana yang terjadi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga terkait dan peran serta dari organisasi penanganan bencana, sehingga dalam tiap kejadian korban bencana

sudah mendapatkan bantuan yang tersampaikan tepat waktu. Bantuan yang diberikan berupa evakuasi korban dari lokasi bencana, pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan yang tersampaikan tepat waktu, sehingga realisasi dari target capaian indikator presentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari tercapai 100%. Selama Tahun 2024 jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 57 kejadian bencana.

Adapun formula penilaiannya adalah :

(Jumlah kejadian bencana alam dan bencana sosial yang dilayani / Jumlah kejadian bencana alam dan bencana sosial ) X 100 %  
(57/57\*100) = 100 %

Dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintahan diharapkan dapat membantu meringankan beban korban bencana alam dan bencana sosial.

#### **4. Sasaran ke 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial**

Sesuai dengan hasil Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk tahun 2024 bahwa Dinas Sosial memperoleh Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja predikat A dari Target A. Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan berfluktuasi sesuai dengan akumulasi penilaian evaluasi terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Hasil Evaluasi kinerja dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :



No	Komponen Yang Dinilai	Bobot ( %)	Nilai	
			2023	Periode Juni 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	26,43	26,50
2	Pengukuran Kinerja	30	25,77	26,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,71	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,84	19,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		100	83,75	84,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan untuk 2 (dua) tahun terakhir juga telah mencapai target. Untuk Tahun 2024 ada peningkatan evaluasi akuntabilitas kinerja dari tahun 2023, hal ini dapat kita lihat dari penambahan nilai bobot pada tahun 2023 adalah 83,75 menjadi 84,25. Kategori penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial menuju perubahan yang lebih baik, akuntabel berkinerja baik, dan memiliki manajemen kinerja yang cukup handal.

Pencapaian LKJiP Dinas Sosial di Tahun 2024 dengan mendapat predikat A, hal ini didukung antara lain :

Adanya kerjasama, dan koordinasi dari berbagai pihak;

- 1) Melakukan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026;
- 2) Menetapkan IKU dan Perjanjian Kinerja yang dipergunakannya untuk mengukur pencapaian kinerja Dinas;
- 3) Dibentuknya Tim Pengumpul Data Kinerja.
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan

### **3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :



**Tabel 3. 3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	5.21	4.01	3,96	3.83	96.91
2	Meningkatnya Kualitas PSKS Dalam Penangan PMKS	Indeks Kepuasan PMKS Yang Ditangani	88.34	88.69	86.00	86.73	100.8
3	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100	100	100	100%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A

- Pada sasaran yang pertama yaitu Penanganan PMKS dengan indikator Persentase Penanganan PMKS merupakan komponen dari Pemenuhan Kebutuhan dasar , Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS. Jika dibandingkan dengan capain dari tahun 2023 terjadi penurunan capaian pada tahun 2024 sebesar 0.13%
- Pada sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas PSKS Dalam Penangan PMKS dengan indikator Indeks Kepuasan PMKS yang ditangani. PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial) ini adalah pemberdayaan, pengembangan, peningkatan kemampuan SDM PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jika dibandingkan dari tahun 2023 terdapat penurunan yang cukup signifikan untuk tahun 2024 sebesar 3.81 %.





### **3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3. 4**  
**Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

<b>No</b>	<b>Tujuan/ Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2024</b>	<b>Target Akhir Rencana Strategis</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4/5*100)
1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	3.83	3.96	96.72
2	Meningkatnya Kualitas PSKS Dalam Penangan PMKS	Indeks Kepuasan PMKS Yang Ditangani	86.73	90,00	96.37
3	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi AKIP	A	A	A

Sumber : Renstras Dinas Sosial Tahun 2021-2026

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas sosial tahun 2021-2026 hampir mencapai target yang ditetapkan, bahkan terdapat indikator yang sudah melebihi target



akhir renstra yaitu pada indikator Indeks Kepuasan PMKS yang ditangani.

### **3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten (jika ada)**

Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan untuk saat ini belum memiliki perbandingan perhitungan dengan Standar Nasional maupun Standar Provinsi.

### **3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 3. 5**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	3,96	3.83	96.91	Untuk mendukung keberhasilan indikator ini didukung beberapa Program yaitu program Rehabilitasi Sosial dan program Perlindungan dan Jaminan. keberhasilan pada program ini tidak terlepas dari penguatan data penerima layanan dan asasmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Adapun dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, Dinas Sosial menyerahkan secara langsung kepada penerima layanan. Dalam pengelolaan data fakir miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial aktif dalam validasi dan verifikasi kelayakan data. Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah melakukan upaya peningkatan kapasitas Operator SIKS-NG dengan mengadakan bimbingan teknis.	Mendirikan rumah singgah untuk memfasilitasi kebutuhan orang terlantar dan ODGJ. -



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dibalik keberhasilan ada juga permasalahan yang dihadapi yaitu untuk menangani kedaruratan seperti ODGJ, Lansia terlantar dan anak terlantar, karena sampai saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan belum memiliki Rumah Singgah untuk menampung ODGJ, Anak terkantar dan Lansia Terlantar	
2	Meningkatnya Kualitas PSKS Dalam Penangan PMKS	Indeks Kepuasan PMKS Yang Ditangani	86.00	86,73	100.8	-Penyelenggaraan program-program pelatihan keterampilan, serta pembangunan ekonomi masyarakat rentan. - Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesejahteraan sosial	Memberikan bimbingan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial seperti TKSK, Pekerja Sosial, Pendamping Sosial, Tagana,
3	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100	100%	100%	Keberhasilan pada progam ini tidak terlepas dari dukungan anggaran dalam penyediaan bantuan untuk korban bencana alam dan sosial sehingga korban bencana alam dan sosial yang ada diwilayah Kabupaten Humbang	Kolaborasi Lintas OPD dan Pemerintah Desa apabila ada kejadian bencana untuk segera di laporkan



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2024**  
**Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Hasundutan dapat terjangkau layanan penanganan pasca bencana oleh. Selain itu juga terdapat TAGANA (Taruna Siaga Bencana) sebagai pelopor terdepan yang senantiasa siap siaga dalam menyalurkan bantuan kepada orban bencana alam dan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi AKIP	A	A	A		

Sumber : Dinas Sosial

Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial rata-rata , semua indikator tersebut mencapai target yang direncanakan. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait, dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Pada tahun 2024 masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial yaitu :

1. Masih terbatasnya anggaran pada Dinas Sosial untuk penanganan PMKS.
2. Belum adanya rumah singgah untuk menampung ODGJ, Anak terlantar dan lansia terlantar yang membutuhkan penanganan.
3. Masih banyak Data PMKS yang belum terupdate dan juga data belum sinkron dengan data DTKS
4. Masih kurangnya SDM yang berkompeten untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Sosial.
5. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial masih perlu mendapatkan dukungan yaitu dengan melaksanakan pelatihan kepada PSKS supaya lebih berkompeten dalam memberikan pelayanan lebih optimal kepada masyarakat.
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung PSKS dalam pelaksanaan penanganan PMKS.
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Dinas
8. Jauhnya akses untuk mendata PMKS

### **3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3. 6**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penanganan PMKS	3,96	3.83	96.91	931.049.200	887.255.208	95.30%	
2	Meningkatnya Kualitas PSKS Dalam Penangan PMKS	86.00	86,73	100.8	673.874.180	636.347.100	94.43%	
3	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100	100%	100%	184.138.900	86.770.400	100%	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	A	A	A	2.427.886.810	2.360.758.248	97.17%	
	TOTAL				4.216.949.090	3.971.130.956	94.17	

Sumber : Dinas Sosial

Keberhasilan Pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terlepas dari ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia. Pada tahun 2024 Dinas Sosial melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.216.949.090 dan realisasi 3.971.130.956 dan capain sebesar 94,17 %. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, merupakan keberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Sosial yang dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya Manusia yang ada di Dinas Sosial Humbang Hasundutan. Setiap PNS melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksimal, guna menunjang keberhasilan pencapaian indikator Kinerja, serta Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien serta tepat sasaran, sehingga target indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:





**Tabel 3. 7**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
			%			%		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	3,83	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	3,95		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	70	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Penanganan PMKS
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BukanKorban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	34	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Penanganan PMKS
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	9,16		



				<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin	150761	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Penanganan PMKS
2	Meningkatnya Kualitas PSKS Dalam Penangan PMKS	Indeks Kepuasan PMKS Yang Ditangani	86,73	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Partisipasi PSKS Dalam Menangani PMKS	86,73		
				<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase PSKS yang dibina	66	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian indeks Kepuasan PMKS yang ditangani
3	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Sosial	100		
				<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</i>	Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat penanganan pemenuhan pangan dan sandang	57	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi AKIP	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan	94		



				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	7	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan	95	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	94	Menunjang	Merupakan Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Sumber : DPA Dinas Sosial Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja program dan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tergantung dari adanya kerjasama atau kolaborasi yang baik antar program dalam pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial menghadapi beberapa kendala seperti harus melaksanakan suatu program/kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang sebelumnya tidak direncanakan namun kegiatan tersebut tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat dan merupakan kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 8**  
**Belanja Anggaran**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
1	Belanja Langsung	4.216.949.090	3.971.130.956
	a. Belanja Pegawai	2.059.096.054	2.024.541.258
	b. Belanja Barang/Jasa	1.686.853.036	1.485.609.698
	c. Belanja Bantuan Sosial	437.000.000	437.000.000
	d. Belanja Modal	34.000.000	23.980.000
2	Belanja Tidak Langsung	-	-



**Tabel 3. 9**  
**Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Strategis Sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Sosial Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program Utama		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
			(%)					(%)
1	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	3,83	I	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>461.104.800</b>	<b>446.794.640</b>	<b>96,90</b>
				1)	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>117.301.800</b>	<b>105.422.940</b>	89,87
				a	<i>Penyediaan Alat Bantu</i>	46.209.800	45.454.600	98,37
				b	<i>Pemberian Layanan Kedaruratan</i>	71.092.000	59.968.340	84,35
				2)	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>343.803.000</b>	<b>341.371.700</b>	<b>99,29</b>
					<i>Pemberian Layanan Data dan Pengaduan</i>	33.072.000	33.072.000	100,00



					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	310.731.000	308.299.700	99,22
				<b>II</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>469.944.400</b>	<b>440.460.568</b>	<b>93,73</b>
				<b>3)</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>469.944.400</b>	<b>440.460.568</b>	<b>93,73</b>
				a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	49.997.500	32.498.500	65,00
				b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	222.413.400	210.613.468	94,69
				c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	197.533.500	197.348.600	99,91
2	Meningkatnya Kualitas PSKS Dalam Penangan PMKS	Indeks Kepuasan PMKS Yang Ditangani	86,73	<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>673.874.180</b>	<b>636.347.100</b>	<b>94,43</b>
				<b>4)</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>673.874.180</b>	<b>636.347.100</b>	<b>94,43</b>
				a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	178.000.000	175.764.400	98,74
				b	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	189.370.600	177.753.400	93,87
				c	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	257.860.780	249.599.500	96,80



				d	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	48.642.800	33.229.800	68,31
3	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100%	IV	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>184.138.900</b>	<b>86.770.400</b>	<b>47,12</b>
				5)	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>184.138.900</b>	<b>86.770.400</b>	<b>47,12</b>
				a	Penyediaan Makanan	134.586.900	67.782.400	50,36
				b	Penyediaan Sandang	49.552.000	18.988.000	38,32
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial	Nilai Evaluasi AKIP	A	V	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.427.886.810</b>	<b>2.360.758.248</b>	<b>97,24</b>
				6)	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.652.431</b>	<b>14.649.000</b>	<b>99,98</b>
				a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.652.431	14.649.000	99,98
				7)	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.070.661.947</b>	<b>2.036.094.258</b>	<b>98,33</b>
				a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.059.096.054	2.024.541.258	98,32
				b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.565.893	11.553.000	99,89



				<b>8)</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>185.940.432</b>	<b>175.473.897</b>	<b>94,37</b>
				a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.923.000	5.797.200	97,88
				b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.903.366	69.774.142	87,32
				c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.396.000	21.368.000	99,87
				d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.572.066	10.465.914	99,00
				e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.146.000	68.068.641	99,89
				<b>9)</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.627.000</b>	<b>54.410.204</b>	<b>89,75</b>
				a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.994.000	4.994.000	100,00
				b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.985.000	5.768.204	48,13
				c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.648.000	43.648.000	100,00
				<b>10)</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96.005.000</b>	<b>80.130.889</b>	<b>83,47</b>
				a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.390.000	70.780.889	89,16
				b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.775.000	9.350.000	95,65
				c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.840.000	-	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>4.216.949.090</b>	<b>3.971.130.956</b>	<b>94.17%</b>





Dari data diatas dapat dilihat bahwa, rata-rata realisasi keuangan pada Dinas Sosial dapat mencapai target. Namun ada beberapa kegiatan dengan realisasi rendah yaitu pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang realisasi keuangannya hanya mencapai 47.12%. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini tergantung adanya bencana yang terjadi sementara kejadian selama tahun 2024 hanya 57 kejadian dari target 100 kejadian. Dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar realisasi anggaran 0 %, Sub kegiatan ini tidak terealisasi karena biaya yang sangat minim, sebab yang akan diperbaiki adalah toilet yang digunakan para penyandang disabilitas, karena yang dipergunakan disabilitas sampai saat ini adalah toilet jongkok, pegangan dinsing toilet disabilitas dan beberapa asbes yang sudah rusak.

Secara umum realisasi anggaran pada Dinas Sosial pada tahun 2024 sebesar 94.17%. Hal ini menjadi tugas penting bagi Dinas Sosial kedepannya agar tahun kedepannya bisa mempersiapkan diri menghadapi kebijakan-kebijakan baru dari Pemerintah. Sedangkan untuk realisasi output Dinas Sosial dapat dilihat pada table di bawah ini:



**Tabel 3. 10**  
**Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**  
**Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial**  
**pada Dinas Sosial**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Output				Nilai Capaian Program/ Kegiatan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
		(Rp)	(Rp)						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	673.874.180	636.347.100	94,43%	persen	86,00	84,88	98,70%	
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	673.874.180	636.347.100	94,43%	orang	66	66	100%	
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	178.000.000	175.764.400	98,74%	orang	20	20	100%	
b	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	189.370.600	177.753.400	93,87%	orang	12	12	100%	
c	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	257.860.780	249.599.500	96,80%	orang	33	33	100%	
d	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	48.642.800	33.229.800	68,31%	Lembaga	1	1	100%	
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	461.104.800	446.794.640	96,90%	persen	10,34	3,45	33,37%	



<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>117.301.800</b>	<b>105.422.940</b>	<b>89,87%</b>	<b>orang</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>123%</b>	
a	Penyediaan Alat Bantu	46.209.800	45.454.600	98,37%	unit	42	42	100%	
b	Pemberian Layanan Kedaruratan	71.092.000	59.968.340	84,35%	orang	15	28	187%	
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>343.803.000</b>	<b>341.371.700</b>	<b>99,29%</b>	<b>jiwa</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>	
a	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	33.072.000	33.072.000	100,00%	jiwa	8429	6614	78,47%	
b	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	310.731.000	308.299.700	99,22%	jiwa	34	34	100%	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>469.944.400</b>	<b>440.460.568</b>	<b>93,73%</b>	<b>persen</b>	<b>3,87</b>	<b>3,84</b>	<b>99,22%</b>	
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>469.944.400</b>	<b>440.460.568</b>	<b>93,73%</b>	<b>jiwa</b>	<b>50000</b>	<b>150761</b>	<b>301,52%</b>	
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	49.997.500	32.498.500	65,00%	jiwa	10000	18214	182,14%	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	222.413.400	210.613.468	94,69%	jiwa	50000	131914	263,83%	
c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	197.533.500	197.348.600	99,91%	KK	110	110	100,00%	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>184.138.900</b>	<b>86.770.400</b>	<b>47,12%</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>	



<b>5</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>184.138.900</b>	<b>86.770.400</b>	<b>47,12%</b>	<b>KK</b>	<b>100</b>	<b>57</b>	<b>57,00%</b>	
a	Penyediaan Makanan	134.586.900	67.782.400	50,36%	KK	100	57	57,00%	
b	Penyediaan Sandang	49.552.000	18.988.000	38,32%	KK	50	19	38,00%	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.427.886.810</b>	<b>2.360.758.248</b>	<b>97,24%</b>	<b>persen</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>98,95%</b>	
<b>6</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.652.431</b>	<b>14.649.000</b>	<b>99,98%</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.652.431	14.649.000	99,98%	Dokumen	7	7	100%	
<b>7</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.070.661.947</b>	<b>2.036.094.258</b>	<b>98,33%</b>	<b>persen</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.059.096.054	2.024.541.258	98,32%	orang	18	18	100%	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	11.565.893	11.553.000	99,89%	Dokumen	15	15	100%	
<b>8</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>185.940.432</b>	<b>175.473.897</b>	<b>94,37%</b>	<b>persen</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.923.000	5.797.200	97,88%	paket	1	1	100%	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.903.366	69.774.142	87,32%	paket	4	4	100%	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.396.000	21.368.000	99,87%	paket	2	2	100%	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.572.066	10.465.914	99,00%	paket	1	1	100%	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.146.000	68.068.641	99,89%	laporan	180	180	100%	



<b>9</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.627.000</b>	<b>54.410.204</b>	<b>89,75%</b>	<b>persen</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.994.000	4.994.000	100,00%	lembar	400	400	100%	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.985.000	5.768.204	48,13%	paket	1	1	100%	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.648.000	43.648.000	100,00%	paket	2	2	100%	
<b>10</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96.005.000</b>	<b>80.130.889</b>	<b>83,47%</b>	<b>persen</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>99%</b>	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.390.000	70.780.889	89,16%	unit	5	5	100%	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.775.000	9.350.000	95,65%	unit	25	25	100%	
c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.840.000	-	0,00%	Unit	1	0	0%	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.216.949.090</b>	<b>3.971.130.956</b>	<b>94.17%</b>					



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 mencapai target yang diharapkan dengan nilai tinggi dan sangat tinggi. Dengan dukungan anggaran Rp 4.216.949.090,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.971.130.956,- atau sebesar 94.17 % dengan 5 Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Sosial tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial memiliki 4 sasaran strategis dengan seluruh sasaran strategis tercapai dengan predikat sangat tinggi.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Sosial adalah:
  - Masih terbatasnya anggaran pada Dinas Sosial untuk penanganan PMKS
  - Belum adanya rumah singgah untuk menampung ODGJ, Anak terlantar dan lansia terlantar yang membutuhkan penanganan
  - Masih banyak Data PMKS yang belum sinkron dengan data DTKS
  - Masih kurangnya SDM yang berkompeten untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Sosial
  - Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial masih perlu mendapatkan dukungan yaitu dengan melaksanakan pelatihan kepada PSKS



supaya lebih berkompeten dalam memberikan pelayanan lebih optimal kepada Masyarakat

- Belum optimalnya sarana dan prasana untuk mendukung PSKS dalam pelaksanaan penanganan PMKS

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan penanganan PMKS karena dari data PMKS belum semua bisa ditangani.
2. Dalam Penangan PMKS perlu adanya didirikan rumah singgah untuk menampung ODGJ, Anak terlantar dan Lansia Terlantar.
3. Untuk peningkatan mutu pelayanan PSKS dalam pelayanan PMKS perlu adanya bimbingan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial seperti TKSK, Pekerja Sosial, Pendamping Sosial, Tagana.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Doloksanggul, 06 Pebruaru 2025  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Humbang Hasundutan



Frans Judika B. Pasaribu, SE, M.Si  
NIP. 19790804 200312 1 002



## **LAMPIRAN**

### **Dokumentasi Pelayanan Dinas Sosial**

#### **1. Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam**















## 2. Pelaksanaan Bimbingan Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas





### 3. Pelayanan Kepada ODGJ









#### 4. Pemberian Alat Bantu

